



**LAPORAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA**



## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2022. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP (Perangkat Daerah) Kota Tarakan Tahun 2022 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2021. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, 10 Januari 2023

Kepala Dinas,

**FANDARIANSYAH, S.T., M.T**  
NIP. 19710508 199803 1 009



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2024. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024, selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) visi, 2 (dua) misi, 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja tahun kedua RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 113,32%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 194.664.294.125,- dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebesar Rp. **191.655.534.893,-** atau 98,45%.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 5 sasaran yang mencakup 10 indikator sasaran, diketahui bahwa rata-rata realisasi **capaian kinerja tahun 2022 mencapai 113,32% atau bermakna Sangat Tinggi** dengan uraian 10 sasaran sangat tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

**Tim Penyusun LKIP**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tahun 2023,**



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Aparat Pemerintah .....	5
D. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	6
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Visi Kota Tarakan 2019-2024 .....	10
B. Misi Kota Tarakan 2019-2024.....	12
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	21
E. Indikator Kinerja Utama .....	26
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	30
B. Analisis Pengukuran Kinerja .....	33
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	67
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Tindak Lanjut Rekomendasi .....	79



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tarakan per Desember 2022.....	5
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	21
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022.....	23
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.....	27
Tabel 3.1	Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	31
Tabel 3.3	Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	32
Tabel 3.4	Capaian Indikator Sasaran Pertama Tahun Ketiga (2022).....	34
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Dibanding dengan Capaian Nasional.....	35
Tabel 3.6	Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Tarakan.....	35
Tabel 3.7	Data Capaian SPM terkait Pelayanan Air Limbah Domestik.....	40
Tabel 3.8	Capaian Indikator Sasaran Kedua Tahun Ketiga (2022).....	41
Tabel 3.9	Capaian Indikator Sasaran Ketiga Tahun Ketiga (2022).....	45
Tabel 3.10	Capaian Indikator Sasaran Keempat Tahun Ketiga (2022).....	47
Tabel 3.11	Capaian Indikator Sasaran Kelima Tahun Ketiga (2022).....	50
Tabel 3.12	Daftar Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Kilometer).....	51
Tabel 3.13	Data Tenaga Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat.....	54
Tabel 3.14	Capaian Indikator Sasaran Keenam Tahun Ketiga (2022).....	55
Tabel 3.15	Capaian Indikator Sasaran Ketujuh Tahun Ketiga (2022).....	57
Tabel 3.16	Capaian Indikator Sasaran Kedelapan Tahun Ketiga (2022).....	59
Tabel 3.17	Capaian Indikator Sasaran Kesembilan Tahun Ketiga (2022).....	63
Tabel 3.18	Kawasan Banjir Kota Tarakan Awal Tahun 2022.....	63
Tabel 3.19	Kawasan Banjir Kota Tarakan Akhir Tahun 2022.....	64



Tabel 3.20	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022.....	66
Tabel 3.21	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	67
Tabel 3.22	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022.....	69
Tabel 3.23	Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.....	72



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sementara sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selaku unsur pelaksana bidang infrastruktur dasar dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan:



- 1) Rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan 2019-2024;
- 2) Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022; dan
- 3) Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, dan Bidang Pengairan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, dan Bidang Pengairan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, dan Bidang Pengairan Sumber Daya Air;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



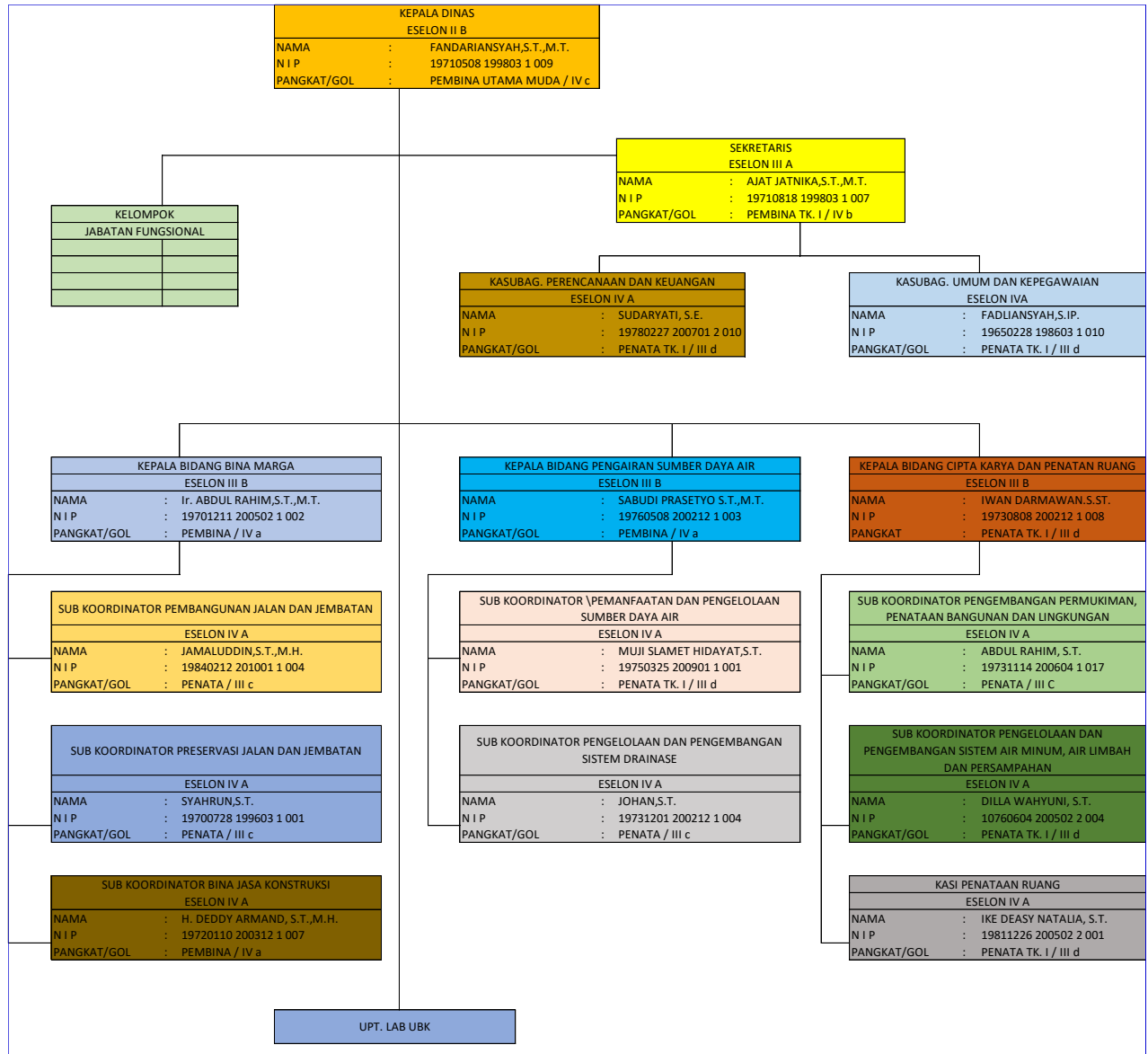


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  
- b. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
  3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
  
- c. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, terdiri atas:
  1. Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan;
  3. Seksi Penataan Ruang.
  
- d. Kepala Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air, terdiri atas:
  1. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.



# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN





### C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana bidang infrastruktur, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Aparat Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang ada di dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**TABEL 1.1**  
**DATA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**  
**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**PER DESEMBER 2022**

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
					SMP	SMA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Sekretariat	13	5	8	-	2	-	-	8	3	-
2	Bina Marga	20	17	3	-	4	-	-	13	3	-
3	Cipta Karya dan Penataan Ruang	24	18	6	-	5	1	-	16	2	-
4	Pengairan Sumber Daya Air	18	14	4	-	8	-	-	8	2	-
5	UPT. Lab UBK	7	7	-	-	3	-	-	4	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR (2022)

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut cukup memadai, dengan Jabatan Kepala Bidang sebanyak 3 (tiga) jabatan dan 1 (satu) orang memangku jabatan Sekretaris, yang secara kepangkatan



sudah memenuhi, sehingga memperkuat kinerja masing-masing bidang yang bersangkutan.

#### **D. ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan infrastruktur dasar kepada masyarakat, permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu permasalahan belum meratanya infrastruktur dasar di Kota Tarakan. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a.) Pembangunan jalan lingkar Tarakan menjadi jalan strategis nasional (JSN) guna percepatan pembangunan ekonomi dan wisata.
- b.) Peningkatan infrastruktur jalan eksisting untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan akses menuju obyek wisata Pantai Amal.
- c.) Pembangunan jembatan Bulungan – Tarakan.
- d.) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan darat dan jembatan.
- e.) Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- f.) Pengurangan luasan wilayah banjir.
- g.) Pembangunan tanggul pengaman pantai untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat.
- h.) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
- i.) Peningkatan kualitas layanan air minum untuk masyarakat.
- j.) Mempertahankan dan meningkatkan ruang terbuka hijau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali



Kota dalam pelaksanaan pemenuhan infrastruktur dasar adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan antara lain:

- 1) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- 2) Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- 3) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- 4) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Dukungan masyarakat dalam penyelesaian pembangunan masih rendah.
2. Aturan birokrasi yang panjang.
3. Tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih dengan OPD lain.
4. Disiplin rekanan/pihak ketiga dalam menyelesaikan proses administrasi yang masih rendah.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut:

#### **1) Belum Optimalnya Pengendalian Tata Ruang Kota**

Hal ini terjadi karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tersedia serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan penataan ruang. Belum optimalnya pengendalian tata ruang Kota Tarakan disebabkan kurangnya



sosialisasi tentang penataan ruang Kota Tarakan, seperti masih banyaknya bangunan yang berada pada kawasan sempadan jalan, sungai maupun pantai. Ijin mendirikan bangunan (IMB), tempat usaha dan pemasangan reklame yang tidak sesuai prosedur.

Permasalahan banjir juga belum tertangani maksimal dikarenakan ruang terbuka hijau Kota Tarakan masih berada di bawah 30% dan belum sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sedimentasi pada saluran air/gorong-gorong. Perubahan tata guna lahan lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, erosi, dan juga sedimentasi.

## **2) Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat**

Infrastruktur dasar yang masih menjadi permasalahan adalah pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka melestarikan sumber air masih kurang dan tingkat pelayanan air bersih masih rendah. Belum semua rumah tangga terlayani air minum. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa embung berkurang debit airnya.

## **3) Rendahnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat**

Sarana dan prasarana sangat penting guna memperlancar akses bagi masyarakat Kota Tarakan, diantaranya kondisi jalan Kota Tarakan masih ada yang rusak dan beberapa daerah ada yang belum menikmati kemudahan akses. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang kurang mengakibatkan masih adanya kualitas pembangunan infrastruktur yang rendah. Ketersediaan taman bermain ramah anak di Kota Tarakan dianggap masih kurang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan



merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A. Visi Kota Tarakan 2019-2024**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota Tarakan, sehingga semua tahapan dan langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan. Pernyataan visi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI  
SMART CITY”**





Pernyataan visi Kota Tarakan 2019 – 2024 memiliki makna sebagai berikut:

### **1. Maju**

Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek, bukan obyek pembangunan.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

### **2. Sejahtera**

Mengandung makna keselamatan seutuhnya, Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketentraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan.

Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintah yang kuat pula.



### 3. *Smart City*

Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Pengertian *smart city* secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial, dan ekonomi. Ada 6 (enam) indikator utama *smart city* (*Boyd Cohen*) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain:

- a) *Smart Living* atau hidup yang cerdas
- b) *Smart Governance* atau pemerintah yang cerdas
- c) *Smart Economy* atau ekonomi cerdas
- d) *Smart Mobility* atau mobilitas cerdas
- e) *Smart Environment* atau lingkungan cerdas
- f) *Smart People* atau masyarakat cerdas

#### B. Misi Kota Tarakan 2019-2024

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

##### **1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.**

Misi Pertama, Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing mengandung arti bahwa manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni



pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

**2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.**

Misi Kedua, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat mengandung arti bahwa suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku kepentingan, yaitu: pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yaitu pengaturan mengenai penggunaan kewenangan, dimana dalam mengatur kewenangan disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Penerapan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.



**3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.**

Misi Ketiga, Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan mengandung arti bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi, baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

**4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas.**

Misi Keempat, Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas mengandung arti bahwa menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas



juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

**5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.**

Misi Kelima, Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan mengandung arti bahwa sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk didalamnya mitigasi bencana.



## **6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.**

Misi Keenam, Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum mengandung arti bahwa pembangunan akhlak dan moral sangat penting, dimana apabila akhlak dan moral dijunjung tinggi, maka tatanan kehidupan akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik.

### **C. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Selain itu, tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Kota Tarakan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kota Tarakan selama periode 2019-2024 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan. Ketersediaan infrastruktur dalam suatu daerah merupakan faktor yang memiliki peranan penting bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu, penyediaan infrastruktur yang berkualitas dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tersebar merata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Guna mencapai keberlanjutan pembangunan yang komprehensif diperlukan keterpaduan antara tiga pilar pembangunan, yaitu ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mana ketiganya saling terintegrasi dan memperkuat satu dengan yang lain. Pengintegrasian ketiga aspek tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup/ekologi dari penurunan kualitas serta menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan, dicapai dengan sasaran diantaranya:

- a) Meningkatnya pelayanan air bersih, dengan indikator sasaran yaitu persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum.
- b) Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, dengan indikator sasaran diantaranya sebagai berikut:
  - Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah.
  - Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum.
  - Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata.
  - Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap.
  - Persentase pembinaan jasa konstruksi.
  - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.



- c) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan, dengan indikator sasaran yaitu persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun.
- d) Meningkatnya pengendalian banjir, dengan indikator sasaran yaitu persentase luas genangan banjir.
- e) Meningkatnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan indikator sasaran yaitu nilai SAKIP.





**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

**Visi : Mewujudkan Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City***

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Kondisi awal (2020)	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir
<b>Misi 3 : Meningkatnya dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan</b>										
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastuktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	Jumlah rumah tangga terlayani air minum (jiwa) / Jumlah rumah tangga Kota Tarakan (jiwa) x 100	74.05%	74.38%	92.34%	95.62%	95.96%
			Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik / Jumlah rumah Kota Tarakan x 100	72.63%	72.75%	72.87%	72.99%	73.11%
				Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	Jumlah bangunan gedung tahun ini dan tahun sebelumnya / jumlah bangunan Gedung x 100	16.67%	57.58%	72.73%	87.88%	100%
				Persentase bangunan dan	Jumlah persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang	21.12%	45.00%	58.75%	82.50%	100%



				lingkungan yang tertata	terbangun / Jumlah kawasan bangunan x 100					
				Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang / Panjang jalan se Kota Tarakan x 100	60.21%	60.65%	64.14%	65.63%	65.94%
				Persentase pembinaan jasa konstruksi	Jumlah jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan / jumlah jasa konstruksi keseluruhan x 100	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya / Luas Kota Tarakan x 100	82.49%	86.10%	89.54%	93.94%	98.35%
<b>Misi 5 : Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif Berbasis Ilmu Pengetahuan</b>										
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persentase TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS yang terbangun	Jumlah TPS/TPS-3R yang terbangun / Jumlah total rencana TPS/TPS-3R sampai dengan tahun 2024 x 100	47.06%	64.71%	76.47%	88.24%	100%
				Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase luas genangan banjir	(Luas rawan genangan – Luas genangan yang tertangani) / Luas Kota Tarakan x 100	0.230%	0.228%	0.116%	0.110%

Sumber: Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022



#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan air bersih	1	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	92,34 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	72,87 %
		3	Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	72,73 %
		4	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	58,75 %
		5	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	64,14 %
		6	Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00 %
		7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	89,54 %



3	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan	8	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	76,47 %
4	Meningkatnya pengendalian banjir	9	Persentase luas genangan banjir	0,116 %
5	Meningkatnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Nilai SAKIP	75 % / BB
		11	Persentase pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi sesuai standar SNI	100%

Sumber: Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022

Untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri atas 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkan strategi melalui 11 (sebelas) program kerja, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.255.892.417.697,00.

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam tabel 2.3 sebagai berikut:



**TABEL 2.3**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN**  
**TAHUN 2022**

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2022		BAGIAN/ BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Meningkatnya Pelayanan Air Bersih</b>	<b>Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum</b>	<b>92,34</b>	<b>69.668.679.748,00</b>	<b>Bidang Pengairan Sumber Daya Air</b>
	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	Volume tampungan air baku (meter <sup>3</sup> )	1.025.590 m <sup>3</sup>	45.779.396.848,00	Bidang Pengairan Sumber Daya Air
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun (buah)	2	45.779.396.848,00	Bidang Pengairan Sumber Daya Air
		Volume tampungan embung dan penampung lainnya	1.025.590 m <sup>3</sup>		
	- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan (buah)	3 Dokumen	399.998.155,00	Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
	- Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah tampungan air baku yang dibangun	2 Buah	12.319.464.347,00	Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
	- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah penambahan panjang bangunan pengaman sungai yang terbangun (m)	23 m	1.000.000.000,00	Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
	- Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah penambahan panjang kanal banjir yang terbangun	1778 m	31.009.934.351,00	Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
	- Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang terpelihara (m)	100 m	1.049.999.995	Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Persentase cakupan layanan air bersih	92,34 %	23.889.282.900,00	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	92,34	23.889.282.900,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah pengadaan Sambungan Rumah (SR)	2500	23.789.282.900,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	1 Dokumen	100.000.000,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
2	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah</b>	<b>72,87 %</b>	<b>2.153.300.000,00</b>	<b>Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang</b>
	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	72,87 %	2.153.300.000,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
	- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal	20.000.000,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan



	- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			2.133.300.000,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
		<b>Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum</b>	<b>72,73 %</b>	<b>38.601.607.625,00</b>	<b>Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang</b>
	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	72,73 %	38.601.607.625,00	Seksi Pengembangan, Permukiman, Penataan Bangunan&Lingkungan
	- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah bangunan yang memiliki IMB dan memiliki SLF	500 Bangunan	122.020.680,00	Seksi Pengembangan, Permukiman, Penataan Bangunan&Lingkungan
	- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung dan fasilitas umum yang terbangun	4	34.460.046.534,00	Seksi Penataan Ruang, Seksi Pengembangan, Permukiman, Penataan Bangunan&Lingkungan
	- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung dan fasilitas umum yang terpelihara	6	4.019.540.411,00	Seksi Pengembangan, Permukiman, Penataan Bangunan&Lingkungan
		<b>Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata</b>	<b>58,75 %</b>	<b>43.974.326.543,00</b>	<b>Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang</b>
	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	Persentase bangunan dan lingkungan	58,75 %	43.974.326.543,00	Seksi Pengembangan, Permukiman, Penataan Bangunan&Lingkungan
	- Penataan Bangunan Lingkungan	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	58,75 %	43.974.326.543,00	Seksi Pengembangan, Permukiman, Penataan Bangunan&Lingkungan
		<b>Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap</b>	<b>64,14 %</b>	<b>62.061.088.990,00</b>	<b>Bidang Bina Marga</b>
	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	64,14 %	62.061.088.990,00	Bidang Bina Marga
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan	2	200.000.000,00	Seksi Preservasi Jalan & Jembatan
	- Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey	2	366.267.200,00	Seksi Preservasi Jalan & Jembatan
	- Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya	3.231 km	47.973.733.433,00	Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan
	- Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara berkala	1,084 km	5.846.681.300,00	Seksi Preservasi Jalan & Jembatan
	- Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara rutin	15	2.060.799.000,00	Seksi Preservasi Jalan & Jembatan
	- Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	1	3.667.846.225,00	Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan
	- Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	1	500.000.000,00	Seksi Preservasi Jalan & Jembatan
		<b>Persentase pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>20,00 %</b>	<b>4.988.440,00</b>	<b>Bidang Bina Marga</b>
	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00 %	4.988.440,00	Seksi Jasa Konstruksi
	- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	70%	4.988.440,00	Seksi Jasa Konstruksi
		<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>89,54 %</b>	<b>801.129.420,00</b>	<b>Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang</b>
	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	89,54 %	801.129.420,00	Seksi Penataan Ruang
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang ditetapkan	1	680.065.550,00	Seksi Penataan Ruang
	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR yang mendapat persetujuan substansi	1	630.156.200,00	Seksi Penataan Ruang



	- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah perkara yang ditetapkan	1	49.909.350,00	Seksi Penataan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor yang dilaksanakan	3 kali	71.063.870,00	Seksi Penataan Ruang
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi TKPRD	1	30.930.000,00	Seksi Penataan Ruang
	- Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah rakor yang dilaksanakan	3	40.133.870,00	Seksi Penataan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	40%	50.000.000,00	Seksi Penataan Ruang
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	40%	50.000.000,00	Seksi Penataan Ruang
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan</b>	<b>Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun</b>	<b>76,47</b>	<b>1.288.602.720,00</b>	<b>Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang</b>
	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	76,47	1.288.602.720,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	2	1.288.602.720,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
	- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah penambahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	2	1.288.602.720,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Banjir</b>	<b>Persentase luas genangan banjir</b>	<b>0,116</b>	<b>25.084.518.239,00</b>	<b>Bidang Pengairan Sumber Daya Air</b>
	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	Persentase luas genangan banjir (%)	0,116	25.084.518.239,00	Bidang Pengairan Sumber Daya Air
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas genangan yang tertangani (Ha)	6,48	25.084.518.239,00	Bidang Pengairan Sumber Daya Air
	- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang terpelihara	18000 m	1.224.518.239,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase
	- Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	3000 m	20.660.000.000,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase, Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air
	- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun	500 m	3.200.000.000,00	Seksi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Nilai SAKIP	75 / BB	12.254.175.972,00	Sekretariat
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	12.254.175.972,00	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	11.155.162.490,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	82	10.254.383.216,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	101	900.779.274,00	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100	122.587.730,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7	4.998.380,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.801.780,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	35 jenis		39.988.400,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3		31.999.770,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	10		19.799.400,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan	100		50.000.000,00	UPT Lab UBK
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat lab yang terkalibrasi dan terakreditasi	12 jenis		50.000.000,00	UPT Lab UBK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100		178.336.970,00	Sekretariat
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	200		2.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 bulan		176.336.970,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara	100		748.088.782,00	Sekretariat
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terselenggara	12		5.700.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terselenggara	20		457.596.711,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terselenggara	20			
	Jumlah BBM yang diadakan	26630 L			
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit motor grader yang terpelihara	1 unit		145.065.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan lab yang terpelihara	12		99.992.950,00	UPT Lab UBK
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara (unit)	33		39.754.121,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<b>Total Anggaran Prioritas</b>				<b>Rp 255.892.417.697,00</b>	

Sumber: Hasil Olahan Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022

## E. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan untuk mengukur keberhasilan program sekaligus meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja utama. Adapun kesembilan indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:





**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra)**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan**

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya pelayanan air bersih	1	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	$\frac{\sum \text{rumah tangga terlayani air minum (jiwa)}}{\sum \text{rumah tangga se-Kota Tarakan (jiwa)}} \times 100$	Persentase	92,34 %	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	$\frac{\sum \text{rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik}}{\sum \text{rumah se-Kota Tarakan}} \times 100$	Persentase	72,87 %	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
	3	Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	$\frac{\sum \text{bangunan gedung tahun ini dan tahun sebelumnya}}{\sum \text{bangunan gedung}} \times 100$	Persentase	72,73 %	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
	4	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	$\frac{\sum \text{persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang terbangun}}{\sum \text{kawasan bangunan}} \times 100$	Persentase	58,75 %	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
	5	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	$\frac{\sum \text{panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang}}{\sum \text{panjang jalan se-Kota Tarakan}} \times 100$	Persentase	64,14 %	Bidang Bina Marga	Kepala Bidang Bina Marga
	6	Persentase pembinaan jasa konstruksi	$\frac{\sum \text{jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan}}{\sum \text{jasa konstruksi keseluruhan}} \times 100$	Persentase	20,00 %	Bidang Bina Marga	Kepala Bidang Bina Marga



	7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	$\frac{\sum \text{luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya}}{\sum \text{luas Kota Tarakan}} \times 100$	Persentase	89,54 %	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan	8	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	$\frac{\sum \text{TPS/TPS3R yang terbangun}}{\sum \text{total rencana TPS/TPS3R sampai dengan tahun 2024}} \times 100$	Persentase	76,47 %	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
Meningkatnya pengendalian banjir	9	Persentase luas genangan banjir	$\frac{\sum \text{luas rawan genangan} - \text{luas genangan yang tertangani}}{\sum \text{luas Kota Tarakan}} \times 100$	Persentase	0,116 %	Bidang Pengairan Sumber Daya Air	Kepala Bidang Pengairan Sumber Daya Air

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Beberapa peraturan diatas mengamanatkan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai



dengan program maupun sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Bab ini akan menyajikan uraian pengukuran kinerja, analisis pengukuran kinerja, dan analisis efisiensi pengguna anggaran dan penghargaan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Nilai Peringkat Kinerja**

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	92,34 %	92,89%	100,59%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	72,87 %	74,17%	101,79%
		Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	72,73 %	110,61%	152,08%
		Persentase penambahan bangunan dan lingkungan yang tertata	58,75 %	59,01%	100,44%
		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	64,14 %	67,38%	105,06%
		Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00 %	24,28%	121,40%



		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	89,54 %	89,54%	100%
3	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	76,47 %	70,59%	92,31%
4	Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase luas genangan banjir	0,116 %	0,116%	100%
5	Meningkatnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP	75/ BB	79,82/BB	106,43%
		Persentase pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan Lab. Uji bahan konstruksi sesuai standar SNI	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>107,22%</b>

Sumber: Hasil Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 yaitu sebesar 107,22%. Capaian kinerja tersebut merupakan capaian pada tahun kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Sebagian besar capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pencapaian kinerja lima sasaran tersebut dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	11
2	76 s/d <90	Tinggi	0
3	66 s/d <75	Sedang	0
4	51 s/d <65	Rendah	0
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	0
Total Sasaran			11

Sesuai dengan data yang tertuang pada tabel 3.3 diatas, diketahui bahwa hasil



capaian kinerja DPUPR Tahun 2022 seluruhnya termasuk dalam predikat Sangat Tinggi, yaitu sejumlah 5 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja.

## B. Analisis Pengukuran Kinerja

**Tujuan:** Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan

**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya pelayanan air bersih

### **Indikator 1:**

Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum

Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia menjadi penting terutama untuk mengatasi terjadinya krisis air bersih. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menjadikan cakupan pelayanan air bersih sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikator kinerja sasaran yaitu, Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menargetkan 92,34 % masyarakat Kota Tarakan dapat mengakses air bersih, dengan asumsi kebutuhan air masyarakat adalah 140 liter/orang/hari dan 1 (satu) sambungan rumah (SR) sama dengan 6 Jiwa (*Sumber Bidang Cipta Karya & PDAM*).

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan isu meningkatnya pelayanan air bersih adalah SPM air baku dan air minum sebab permasalahan air bersih Kota Tarakan tidak hanya pada jangkauan pelayanan jaringan Sambungan Rumah (SR), tetapi juga pada ketersediaan air baku.

Untuk menghitung nilai Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum pada tahun 2022, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menggunakan rumus:



$$\frac{\sum \text{Rumah tangga yang terlayani air minum (Jiwa)}}{\sum \text{Rumah tangga Kota Tarakan (Jiwa)}} \times 100$$
$$= \frac{227.355}{244.769} \times 100$$
$$= 92,89\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dengan indikator kinerja Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Sasaran Pertama Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	%	91,94	116,69	127	92,34	92,89	100,59	95,96	96,80

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, diketahui bahwa capaian tahun 2022 adalah 100,59% dengan kategori Sangat Tinggi. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 127%, capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 26,4%. Meskipun demikian, capaian tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Capaian indikator jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air minum dapat melebihi target didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).





**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Dibanding dengan Capaian Nasional**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2022		
		Target Tarakan	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	%	92,34	92,89	100,59	100	92,89	86,80

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Apabila dibandingkan dengan target dan capaian nasional, maka target terkait sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dengan indikator Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum di tahun 2022 dapat dikatakan cukup berhasil, karena hampir mencapai target dan capaian nasional.

Data jumlah penduduk di Kota Tarakan tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 244.769 jiwa, dimana sebanyak 227.355 jiwa telah terlayani air bersih. Sementara ditinjau dari cakupan pelayanan air bersih Kota Tarakan, target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 92,34% dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah berhasil dicapai 92,89%. Selanjutnya terkait cakupan pelayanan air bersih dirinci per kecamatan yang ada di Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

**Tabel. 3.6**  
**Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Tarakan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Tarakan		Pelayanan Air Bersih PDAM			
		KK	Jiwa	Sumbangan Rumah (SR)		Persentase (%)	
				KK/Unit	Jiwa	KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Tarakan Barat	26.589	83.263	20.959	71.012	78,83	86,32
B	Tarakan Tengah	23.025	69.572	17.513	70.054	76,06	100,69
C	Tarakan Timur	18.420	59.250	11.801	44.990	64,07	75,93
D	Tarakan Utara	10.560	33.684	8.021	32.120	75,96	95,36
Total = (A+B+C+D)		78.594	244.769	58.294	218.176	74,17	89,17

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Tarakan dan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, Desember 2022



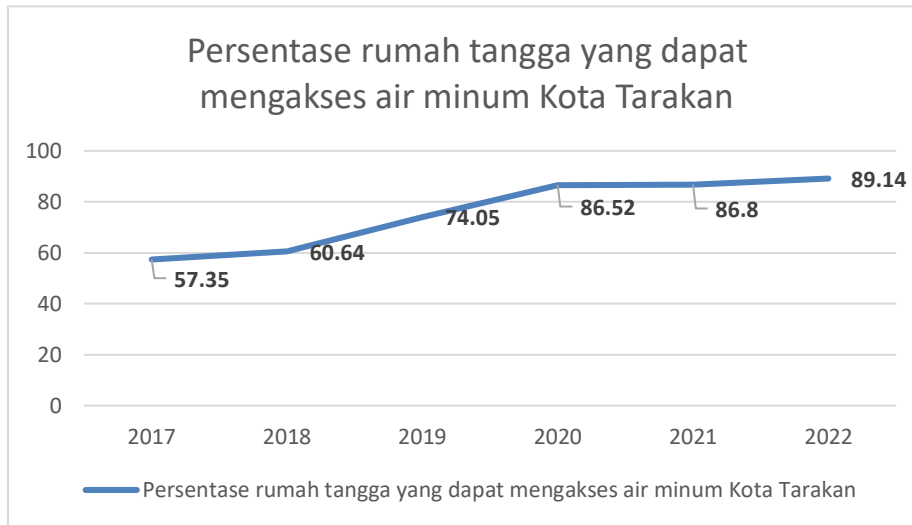
Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi menyebabkan target jumlah penduduk yang akan dilayani terus mengalami peningkatan yang tidak sejalan dengan peningkatan anggaran operasional dan SDM pengelolanya. Permasalahan air bersih kota yang krusial adalah ketersediaan air baku. Sumber cadangan air baku yang ditampung pada embung diperoleh melalui sistem tadah hujan. Apabila tidak turun hujan selama 2 minggu maka cadangan air baku akan mengering. Dalam kondisi normal kapasitas produksi pada umumnya mencapai  $\pm$  400 liter/detik, sedangkan dalam kondisi krisis kapasitas produksi turun hingga 175 liter/detik. Hal ini menyebabkan menurunnya cakupan pelayanan air bersih hingga 42%.

Faktor topografi wilayah juga berkontribusi terhadap pelayanan air bersih terutama pada daerah perbukitan, sehingga membutuhkan penanganan secara teknis yaitu pengadaan *Booster Pump* yang bekerja untuk mendorong debit air pada jaringan perpipaan untuk sampai ke rumah-rumah penduduk. Kendala yang dihadapi adalah pompa yang ada tidak mampu mendorong air pada elevasi yang lebih tinggi, sehingga air bersih sulit terdistribusi ke wilayah tersebut. Faktor lainnya yaitu ketidakstabilan daya listrik jika listrik padam selama 1 jam, maka akan menghambat pendistribusian air bersih hingga 4 jam. Namun semua kendala yang dihadapi tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum yang aman bagi masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menargetkan satu embung tersedia sebagai tambahan sumber air baku. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari proyeksi kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2022. Dengan terealisasinya Embung Bengawan pada tahun 2016 dan pembangunan Embung Rawasari yang selesai pada awal tahun 2019, maka diharapkan target akan kebutuhan air baku untuk pemenuhan air bersih akan tercapai. Berikut ini adalah grafik persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum sejak tahun 2017-2022.



**Grafik 3.1**



Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022

Berdasarkan grafik 3.1 diatas, diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjang oleh program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam program tersebut dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dengan target sejumlah 2500 pengadaan Sambungan Rumah (SR) dan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan sebesar 638 liter/detik.



## DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN AIR BERSIH PEMASANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM



Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022

### **Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan

#### **Indikator 2:**

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik

Air limbah domestik yang berasal dari hasil buangan kegiatan rumah tangga, perkantoran, hotel atau penginapan merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial. Oleh karena itu, air limbah domestik sudah semestinya dikelola dan diolah dengan baik sehingga mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan berbagai macam masalah bagi manusia. Pengelolaan air limbah domestik memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat.



Pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Tarakan terdiri dari 2 macam, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber kemudian lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sistem pengolahan lumpur tinja. Sementara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Pengelolaan air limbah domestik berada dibawah koordinasi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah, dan Persampahan Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang. Berdasarkan informasi dari Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah, dan Persampahan diketahui bahwa sebagian besar pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Tarakan menggunakan SPALD-S, yaitu sebanyak 50 KK pada tahun 2022. Selain itu, ada pula rumah yang memiliki akses sambungan dengan menggunakan SPALD-T yaitu sebanyak 150 KK pada tahun 2022. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah yang telah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 di Kota Tarakan adalah sebanyak 58.294 KK.



**Tabel 3.7 Data Capaian SPM terkait Pelayanan Air Limbah Domestik**

Sistem Pelayanan Air Limbah	Jumlah RT (capil 2022)	Jumlah Rumah Tangga yang harus dilayani	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani
SPALD - S < 25 jiwa/ Ha	51,110	<b>51,110</b>	36,958	14,152
> 25 jiwa/ Ha	26,438	<b>26,438</b>	20,758	5,680
<b>JUMLAH A</b>	<b>77.548</b>	<b>77,548</b>	<b>57,716</b>	<b>19,832</b>
SPALD - T	1,046	1,046	578	468
<b>JUMLAH B</b>	<b>1,046</b>	<b>1,046</b>	<b>578</b>	<b>468</b>
<b>JUMLAH A + B</b>	<b>78,594</b>	<b>78,594</b>	<b>58,294</b>	<b>20,300</b>
<b>CAKUPAN PELAYANAN SANITASI 2022</b>			<b>74,17</b>	

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022

Selanjutnya, untuk menghitung persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum \text{Rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik}}{\sum \text{Rumah di kota}} \times 100$$

$$\frac{58.294}{78.594} \times 100\% = 74,17\%$$

Capaian kinerja dari Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan indikator kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah dapat dinilai dari matrik berikut ini:



**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Sasaran Kedua Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah	%	59,61	74,31	124,66	72,87	74,17	101,79	73,11	101,45

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa capaian realisasi tahun 2022 adalah 101,79% dengan kategori Sangat Tinggi. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya, realisasi dan capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 22,87%. Dari tabel 3.8 diatas juga terlihat bahwa target sudah sepenuhnya tercapai. Berdasarkan hasil realisasi capaian pada tahun 2022, diketahui bahwa realisasi tahun 2022 adalah 74,17%, dimana nilai tersebut sudah diatas target akhir RPJMD. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang memadai dalam pencapaian target. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya capaian realisasi tersebut adalah karena adanya dana bantuan dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Khusus). Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Kegiatan yang dilakukan terkait program ini yaitu Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan target 1 IPAL dan 5 Tangki Septik Komunal.

Capaian realisasi yang tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- Komitmen pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan, salah satunya melalui pembangunan/penyediaan IPAL dan tangki septik komunal.



- Kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan untuk hidup bersih dan sehat dengan pengelolaan air limbah rumah tangga yang mulai meningkat.

Kondisi permasalahan sub sektor air limbah domestik apabila ditinjau secara teknis IPLT masih kurang maksimal dan masih terdapat perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di perkotaan dan adanya cubluk/jamban tidak layak. Apabila ditinjau secara non teknis disebabkan terbatasnya APBD Kota, peran institusi terkait belum maksimal, kurangnya peran serta masyarakat dan swasta, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak air limbah untuk kehidupan baik secara langsung maupun melalui media massa. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan sanitasi sesuai dengan program 100 – 0 – 100 melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) selain APBD tingkat I maupun APBD. Melihat budaya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai masih banyak yg berperilaku BABS, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan penambahan sarana dan prasarana air limbah dengan membangun 3 unit IPAL yang berlokasi di Kelurahan Karang Anyar Pantai RT 1 dan RT 12, Kelurahan Pantai Amal serta 7 unit tangki septik komunal yang berlokasi di Kelurahan Juata Laut RT 11, RT 12, dan 16, Kelurahan Mamburungan RT 22 dan RT 23.





## DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN



Pembangunan IPAL di Kelurahan Pantai Amal



Tangki Septik di Kelurahan Juata Laut

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022

**Indikator 3:**

Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan peningkatan jumlah penduduk, Kota Tarakan membutuhkan infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat mendukung aktivitas penduduknya. Penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum terus diselenggarakan sebagai upaya peningkatan pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Tarakan. Pada tahun 2022, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang melakukan kegiatan pembangunan gedung dan pemeliharaan Gedung, yang mana apabila diakumulasikan dengan jumlah bangunan gedung tahun sebelumnya terdapat 75 bangunan. Dari 75 bangunan tersebut, 35 merupakan bangunan gedung dan fasilitas umum yang terbangun dan terpelihara. Bangunan gedung dan fasilitas umum yang terbangun sejumlah 4 bangunan dan yang terpelihara adalah 31 bangunan.

Sementara total bangunan gedung yang akan dibangun maupun dipelihara yang berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan Renstra DPUPR ada sebanyak 66 bangunan gedung. Oleh karena itu, untuk mengetahui persentase ketersediaan bangunan milik pemerintah dan fasilitas umum yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

$$\frac{\sum \text{Bangunan gedung tahun ini dan tahun sebelumnya}}{\sum \text{Bangunan gedung}} \times 100$$

$$\frac{40 + 35}{66} \times 100$$

$$= 113,63\%$$



**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Sasaran Ketiga Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
Persentase ketersediaan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	%	105,24	72,73	110,61	152,08	100	152,08

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berhasil mencapai 110,61% jika dikomparasikan antara target dan realisasi kegiatan. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian program penataan bangunan gedung sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 152,08%. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program penataan bangunan gedung diantaranya adalah pemeliharaan beberapa bangunan gedung perkantoran, kegiatan *multiyears* diantaranya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga, pembangunan Gedung kesenian dan TCC, pembangunan gedung umat kristiani, dan rehabilitasi Gedung Gadis.

### **DOKUMENTASI KEGIATAN PENAMBAHAN BANGUNAN PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM**



Pembangunan Gedung FKUB



Peningkatan Gedung Sarpras GOR



Rehabilitasi Gedung Gadis



Peningkatan Gedung Sarpras GOR

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022

**Indikator 4:**  
Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya terkait pelayanan dalam bidang pariwisata, maka perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan sarana dan prasarana berupa Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Amal Kota Tarakan. Kawasan wisata ini dibangun dengan harapan mampu memaksimalkan potensi alam sebagai salah satu daya tarik wisata di Kota Tarakan demi menunjang fasilitas pariwisata yang diperlukan. Penataan Kawasan Pantai Amal dibagi menjadi 4 tahap yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024. Pada tahun 2020 penataan kawasan tahap I telah selesai 100%. Pada tahun 2022 penataan kawasan tahap II telah terlaksana sebesar 77,03% dan sudah memulai tahap awal untuk penataan kawasan tahap III. Jumlah persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 127%.



Berikut ini adalah rumus untuk menghitung persentase dan lingkungan yang tertata.

$$\frac{\sum \text{Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang terbangun}}{\sum \text{Kawasan bangunan dan lingkungan yang terbangun}} \times 100$$

$$= \frac{100 + 77,03 + 0}{3} \times 100$$

$$= 59,01\%$$

Berdasarkan rumus diatas, diketahui realisasi capaian kegiatan pada program penataan bangunan dan lingkungannya tahun 2022 adalah sebesar 59,01%. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 58,75%, sehingga nilai capaian pada tahun 2022 apabila dilakukan komparasi antara target dan realisasi adalah sebesar 100,44%. Berikut ini adalah tabel capaian sasaran sesuai dengan indikator persentase bangunan dan lingkungan yang tertata.

**Tabel 3.10**

**Capaian Indikator Sasaran Keempat Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	%	141	58,75	59,01	100,44	100	59.01

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, apabila dilakukan komparasi antara realisasi pada tahun 2022 dengan target akhir RPJMD, maka capaian program penataan bangunan dan lingkungannya adalah sebesar 59,01%. Keberhasilan pencapaian program penataan bangunan dan lingkungannya didukung oleh sub kegiatan yaitu penataan kawasan Pantai Amal tahap II dan pengawasan Pantai Amal.



## DOKUMENTASI KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PANTAI AMAL KOTA TARAKAN



Penataan Kawasan Pantai Amal

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022

**Indikator 5:**  
Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap

Meningkatnya persentase panjang jalan dengan kondisi mantap merupakan indikator kinerja dan fungsi infrastruktur bina marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan



menjelaskan bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka persentase panjang jalan dengan kondisi mantap diperoleh dari akumulasi antara jumlah panjang jalan di Kota Tarakan dalam kondisi baik dan kondisi sedang.

Meningkatnya perbaikan infrastruktur penghubung secara simultan berdampak pada pergerakan roda perekonomian di Kota Tarakan. Penyediaan infrastruktur kota yang memadai terutama akses jalan dengan kondisi mantap merupakan langkah Pemerintah Kota Tarakan untuk dapat memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pemerataan akses infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi aktivitas sehari-hari masyarakat di dalam suatu wilayah. Untuk menghitung persentase tingkat kondisi jalan mantap di tahun 2022, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum \text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\sum \text{Panjang jalan se – Kota Tarakan}} \times 100$$

$$= \frac{156,708}{232,561} \times 100$$

$$= 67,38\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan indikator kinerja Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap dapat dilihat pada tabel berikut ini.



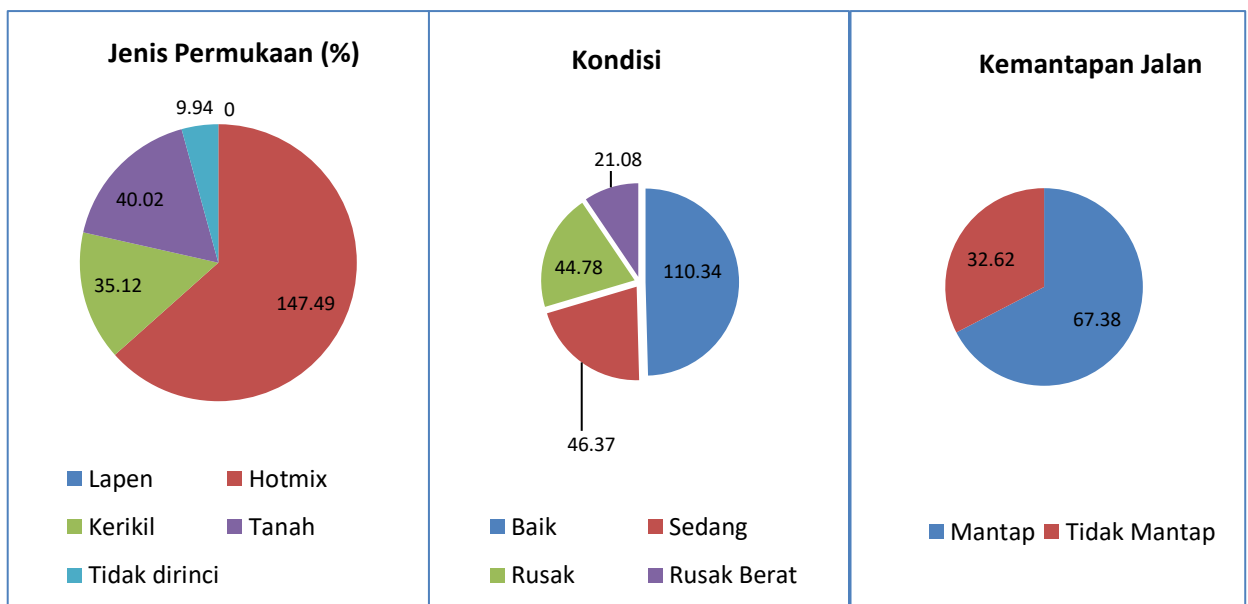
**Tabel 3.11**

**Capaian Indikator Sasaran Kelima Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	%	60,65	65,97	108,77	64,14	67,38	105,06	65,94	102,18

Sumber: Bidang Bina Marga DPUPR (2022)

Program peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada tahun 2022 dicapai dengan sumber dana yaitu APBD dan DAK. Dengan adanya bantuan sumber dana selain dari APBD ini, diharapkan panjang jalan di Kota Tarakan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kondisi jalan mantap dan terhubungnya pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Tarakan. Data mengenai kondisi jalan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 3.4 Keadaan dan status jalan tahun 2022**





Berdasarkan gambar 3.4 tersebut, dapat diketahui bahwa dominasi jenis permukaan jalan di Kota Tarakan adalah hotmix dengan persentase 147,49%. Persentase jalan dengan kondisi mantap di Kota Tarakan sebesar 67,38%. Berikut ini adalah rincian daftar panjang jalan menurut jenis permukaan dan kondisi jalan secara series 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 3.12**  
**Daftar Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Kilometer)**

KEADAAN	STATUS JALAN					
	JALAN KOTA					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. JENIS PERMUKAAN</b>						
a. Lapen	1,50	1,50	-	-	-	-
b. Hotmix	161,59	161,59	168,29	168,29	144,39	147,49
c. Kerikil	32,29	32,29	22,12	22,44	37,02	35,12
d. Tanah	71,85	71,85	31,28	30,97	41,36	40,02
e. Tidak dirinci	13,42	13,42	10,86	10,86	9,79	9,94
<b>JUMLAH</b>	<b>280,65</b>	<b>280,65</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>
<b>II. KONDISI JALAN</b>						
a. Baik	153,08	153,08	156,14	162,98	105,76	110,34
b. Sedang	53,87	53,87	39,31	39,31	47,66	46,37
c. Rusak	22,14	22,15	12,88	6,35	47,10	44,78
d. Rusak Berat	51,55	51,55	24,23	23,92	32,05	31,08
<b>JUMLAH</b>	<b>280,65</b>	<b>280,65</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>
Jalan Dalam Kondisi Mantap	206,96	206,95	195,45	202,29	153,41	156,71
Jalan Dalam Kondisi Tidak Mantap	73,69	73,70	37,11	30,27	79,15	75,85
<b>JUMLAH</b>	<b>280,65</b>	<b>280,65</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>	<b>232,56</b>

Sumber data: Bidang Bina Marga DPUPR Tahun 2022

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mensukseskan tercapainya sasaran ini adalah program peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 adalah survey kondisi jalan/jembatan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan pembangunan jembatan.

Berdasarkan data dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2022, panjang jalan yang terbangun keseluruhan adalah 234,755



kilometer. Panjang Jalan dalam kondisi mantap adalah 156,708 kilometer. Jembatan yang terbangun sejumlah 1 unit.

### **DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2022**



Kegiatan 0% Aspal RT 27 Sebengkok



Kegiatan 100% Aspal RT 27 Sebengkok



Pembangunan 0% Jembatan RT 11 Binalatung Amal



Pembangunan 100% Jembatan RT 11 Binalatung Amal

Sumber: Bidang Bina Marga DPUPR, 2022



**Indikator 6:**  
Persentase pembinaan jasa konstruksi

Pembinaan jasa konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi. Bentuk pembinaan jasa konstruksi dapat berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan pada tahun 2022 adalah pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan sosialisasi dan uji keterampilan. Sosialisasi dilakukan dengan sasaran masyarakat umum Kota Tarakan, terutama yang pekerjaannya bersinggungan langsung dengan jasa konstruksi.

Selain sosialisasi, dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi sekaligus untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, maka Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kaltara bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tarakan dengan mengadakan pembekalan teknis, uji kompetensi dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Kota Tarakan. Kegiatan pembekalan teknis ini difokuskan untuk tenaga ahli K3 Konstruksi dan Ahli Teknik Jalan. Berdasarkan data tersebut diatas, maka jumlah tenaga konstruksi yang telah memperoleh pembinaan sebanyak 122 orang. Sementara tenaga konstruksi yang terlatih dan bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.13

Data Tenaga Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat

No	Uraian	Kumulatif Tahun-Tahun Sebelumnya	Tahun 2022	Kumulatif s/d Tahun 2022
1	Tenaga Operator/Teknis/Analisis Bersertifikasi	689 orang	122 orang	811 orang

Sumber: Bidang Bina Marga DPUPR, 2022

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel diatas, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui persentase pembinaan jasa konstruksi sebagai berikut.

$$\frac{\sum \text{Jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan}}{\sum \text{Jasa konstruksi keseluruhan}} \times 100$$

$$= \frac{811}{3340} \times 100$$

$$= 24,28\%$$

Data tersebut diatas berdasarkan jumlah pegawai perusahaan konstruksi secara keseluruhan. Dalam satu perusahaan, pada umumnya terdiri dari Direktur/Pimpinan, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi, Bagian Operator/Teknis/Analisis, dan Staf Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga operator/teknis/analisis konstruksi 20% dari komponen pegawai perusahaan konstruksi. Berdasarkan informasi dari BPS Kota Tarakan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor konstruksi adalah 6,84% atau sekitar 16.702 jiwa. Berdasarkan data tersebut, 20% dari 16.702 orang diperoleh 3.340 orang tenaga operator/teknis/analisis konstruksi yang memerlukan pelatihan tenaga operator/teknis/analisis yang bersertifikat. Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi merujuk dari data tersebut diatas adalah 24,28%.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan target, realisasi serta capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.14**  
**Capaian Indikator Sasaran Keenam Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
Persentase pembinaan jasa konstruksi	%	113,95	20	24,28	121,40	20	121.40

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan pada Seksi Jasa Konstruksi adalah adanya kerjasama dan dukungan dari Balai Pengembangan Jasa Konstruksi dan Dinas PUPR-PERKIM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, adanya surat edaran dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi perihal permohonan penghentian penertiban izin usaha jasa konstruksi (IUJK). Berdasarkan surat tersebut, diinformasikan bahwa penerbitan IUJK dihentikan dan digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Dengan meningkatnya capaian dalam indikator Persentase pembinaan jasa konstruksi pada tahun 2022, maka berpengaruh pula pada meningkatnya sumber daya manusia dalam bidang jasa konstruksi di Kota Tarakan.

#### **DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**



Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Sumber: Bidang Bina Marga DPUPR, 2022



**Indikator 7:**  
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Salah satu terobosan di bidang tata ruang yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang merupakan acuan utama dalam perizinan berusaha sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KKPR memiliki fungsi menggantikan izin lokasi dan menggantikan berbagai izin pemanfaatan ruang (IPR) untuk membangun dan pengurusan tanah. Bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seperti Kota Tarakan, maka pelaku usaha maupun non-berusaha dapat menggunakan mekanisme Persetujuan KKPR.

Dalam melakukan pembangunan, para pelaku usaha maupun non-berusaha harus menyesuaikan dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah maupun turunannya, agar tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang. Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan data dari Seksi Penataan Ruang sebesar 22.456,6 hektar. Sementara luas Kota Tarakan adalah 25.080 hektar. Berikut ini adalah rumus perhitungan untuk mengetahui persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

$$\frac{\sum \text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya}}{\sum \text{Luas Kota Tarakan}} \times 100$$

$$= \frac{22.456,6}{25.080} \times 100$$

$$= 89,54 \%$$



**Tabel 3.15**

**Capaian Indikator Sasaran Ketujuh Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	%	99,59	89,54	89,54	100	98,35	91,04

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Berdasarkan tabel 3.15 diketahui bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 89,54% dan realisasinya sebesar 89,54%. Sesuai dengan perhitungan komparasi antara target dan realisasi diperoleh nilai capaian sebesar 100%.

**DOKUMENTASI KEGIATAN SEKSI PENATAAN RUANG**



Penilaian KKPR bersama tim KemenATR/BPN



Pemasangan papan plang pelanggaran pemanfaatan ruang

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022



### Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

**Indikator 8:**  
Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun

Sesuai dengan Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan, diperlukan suatu perubahan paradigma yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Proses pengelolaan sampah tersebut dilakukan dalam rangka upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Prinsip yang diusung adalah 3R, yaitu *reduce* atau mengurangi dan mencegah timbulan sampah, *reuse* atau penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain, dan *recycle* atau mengelola sampah untuk dijadikan produk baru.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, indah, lestari dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan program pembangunan TPS-3R dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah skala rumah tangga. Lokasi pembangunan TPS-3R idealnya berada di kawasan permukiman yang disertai dengan partisipasi aktif dari warga masyarakat sekitar. Pembangunan TPS-3R ini merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui sumber pendanaan APBN khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tahun anggaran 2022. Program ini bertujuan agar pengelolaan sampah organik maupun anorganik dalam aspek penanganan sampah melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah dapat berjalan optimal, sehingga Kota Tarakan menjadi kota bebas sampah, sehat, dan berkelanjutan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas





Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan bantuan dana dari pemerintah pusat membangun 1 bangunan TPS-3R yang terletak di Kelurahan Juata Permai.

$$\frac{\sum \text{TPS atau TPS3R yang terbangun}}{\sum \text{Total rencana TPS atau TPS3R sampai dengan tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{8 + 3 + 1}{17} \times 100\%$$

$$= 70,59 \%$$

**Tabel 3.16**

**Capaian Indikator Sasaran Kedelapan Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	%	58,82	70,58	119,99	76,47	70,59	92,31	100	70,59

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase capaian TPS-3R yang terbangun adalah 70,59%. Salah satu tujuan pembangunan TPS-3R adalah untuk mengurangi beban sampah yang akan diolah pada TPA sehingga dapat memperpanjang umur TPA. Kegiatan pada TPS-3R mencakup daur ulang sampah anorganik (plastik dan kardus) dan pengolahan sampah organik (sisa makan menjadi kompos). Namun, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.  
Apabila dari masing-masing individu sudah melakukan pemilahan sampah, ketika dikumpulkan ke dalam truk atau gerobak sampah akan tercampur lagi.
- Keterbatasan fasilitas di TPS-3R dan bank sampah.



Rencana tindak lanjut / rekomendasi beberapa upaya untuk mendorong efektivitas kegiatan di TPS-3R:

- 1) Menghubungkan sistem TPS-3R hingga ke tingkat rumah tangga, dengan cara memberikan bantuan gerobak dengan pengumpulan sampah terpisah dari rumah tangga ke TPS-3R dan pengadaan moda pengangkutan terpadu dari TPS-3R ke industri daur ulang.
- 2) Penguatan keterampilan dan pengetahuan para operator TPS-3R dan bank sampah, bukan hanya sekedar memberi fasilitas atau peralatan.
- 3) Mengintegrasikan bank sampah dengan sektor informal. Misalnya membangun jejaring seperti banksampah.id yang dapat memotong mata rantai produksi dan memperkuat nilai tawar bank sampah.

#### **DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TPS-3R**



Pembangunan TPS-3R Kelurahan Juata Permai

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR, 2022



#### Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengendalian Banjir

**Indikator 9:**  
Persentase luas genangan banjir

Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti perkembangan perkotaannya, maupun bersifat non struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Banjir merupakan suatu masalah yang banyak ditemui di berbagai wilayah, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada dasarnya banjir itu disebabkan oleh luapan aliran air yang terjadi pada saluran atau sungai. Dalam banyak konsep, wilayah banjir atau genangan air adalah wilayah yang aliran air sungainya mengalir melampaui kapasitas tampung sungai dan dengan demikian aliran air sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya.

Demikian halnya dengan Kota Tarakan yang juga terdampak genangan banjir sejak beberapa tahun terakhir. Genangan banjir yang terjadi di Kota Tarakan umumnya terjadi akibat meluapnya air pada saat hujan deras, sementara daya tampung parit lebih kecil dari volume air atau karena posisi air buangan yang lebih rendah dibandingkan posisi air laut. Untuk menghitung nilai tingkat Persentase Penurunan Luas Genangan di tahun 2022, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan menggunakan rumus :



$$\frac{\sum \text{Luas Rawan Genangan} - \text{Luas Genangan Tertangani}}{\sum \text{Luas Kota Tarakan}} \times 100$$

$$= \frac{29,15}{25.080} \times 100$$

$$= 0,116 \%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Meningkatnya Pengendalian Banjir dengan Persentase Penurunan Luas Genangan, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini:

**Tabel 3.17**

**Capaian Indikator Sasaran Kesembilan Tahun Ketiga (2022)**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Realisasi			
Persentase Penurunan Luas Genangan	%	n/a	0,182	0,156	0,116	0,116	100	0,096	120,83

Sumber: Bidang Pengairan Sumber Daya Air DPUPR 2022

Berdasarkan tabel 3.17 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2022 adalah 0,116%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tahun 2021 mengalami peningkatan. Meskipun realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun tidak berarti permasalahan banjir di Kota Tarakan telah teratasi. Pada beberapa titik lokasi masih terdapat genangan banjir dengan luasan 29,15 Ha yang tersebar di beberapa titik di Kota Tarakan. Berikut ini adalah tabel 3.18 kawasan banjir di Kota Tarakan pada kondisi awal tahun 2022 dan tabel 3.19 kawasan banjir Kota Tarakan kondisi akhir tahun 2022.



Tabel. 3.18 Kawasan Banjir Kota Tarakan Awal Tahun 2022

<b>Kawasan Banjir Kota Tarakan Awal Tahun 2022</b>					
Kode	Lokasi	Luas Genangan (Ha)	Lama Genangan (Jam)	Tinggi Genangan (cm)	Permukiman Tergenang (Ha)
B.01	Karang Anyar	30.00	± 2-3	± 20 - 40	30.00
B.02	Jl.Padat Karya (Dekat Pasar Juata Laut)	4.80	± 1	± 10	2.00
B.03	Markoni	3.60	± 1-2	± 15 - 30	3.60
B.04	Jl. Celebes/ Belakang Kepiting Saos	0.00	± 1.5	± 25	0.00
B.05	Jl. Aki Balak/ Yonif 613 Raja Alam	0.00	± 1	± 20	0.00
B.06	Selumit dan Karang Balik	0.16	± 2	± 15	0.16
B.07	Sebengkok	0.00	± 0.5	± 10	0.00
B.08	JL. P. Sulawesi	0.30	± 0.45	± 10	0.30
B.09	JL. WR. Supratman (Jl. Wijaya Kusuma)	0.00	± 2	± 15	0.00
B.10	JL. S. Sesayap/ Depan SMP dan SD Ulul Albab	0.27	± 0.75	± 20	0.20
B.11	Jl. P. Flores	0.06	± 1	± 15	0.06
	<b>JUMLAH</b>	<b>39.19</b>			<b>36.32</b>

Sumber: Bidang Pengairan Sumber Daya Air DPUPR 2022



Tabel. 3.19 Kawasan Banjir Kota Tarakan Akhir Tahun 2022

Kawasan Banjir Kota Tarakan Akhir Tahun 2022					
Kode	Lokasi	Luas Genangan (Ha)	Lama Genangan (Jam)	Tinggi Genangan (cm)	Permukiman Tergenang (Ha)
B.01	Karang Anyar	24.00	± 2-3	± 20 - 40	24.00
B.02	Jl.Padat Karya (Dekat Pasar Juata Laut)	2.40	± 1	± 10	2.00
B.03	Markoni	2.40	± 1-2	± 15 - 30	2.40
B.04	Jl. Celebes/ Belakang Kepiting Saos	0.00	± 1.5	± 25	0.00
B.05	Jl. Aki Balak/ Yonif 613 Raja Alam	0.00	± 1	± 20	0.00
B.06	Selumit dan Karang Balik	0.08	± 2	± 15	0.08
B.07	Sebengkok	0.00	± 0.5	± 10	0.00
B.08	JL. P. Sulawesi	0.00	± 0.45	± 10	0.00
B.09	JL. WR. Supratman (Jl. Wijaya Kusuma)	0.00	± 2	± 15	0.00
B.10	JL. S. Sesayap/ Depan SMP dan SD Ulul Albab	0.27	± 0.75	± 20	0.20
B.11	Jl. P. Flores	0.00	± 1	± 15	0.00
<b>JUMLAH</b>		<b>29.15</b>			<b>28.68</b>

Sumber: Bidang Pengairan Sumber Daya Air DPUPR 2022

### DOKUMENTASI KEGIATAN NORMALISASI SUNGAI



Normalisasi Saluran Mulawarman

Sumber: Bidang Pengairan Sumber Daya Air DPUPR, 2022



**Sasaran Strategis 5:** Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Indikator 10:**  
Nilai SAKIP

Evaluasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan memperoleh nilai sebesar 79,82% dengan Kategori BB atau dengan interpretasi Sangat Baik.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	92,34	92,89	100,59
2	Meningkatnya sarana & prasarana perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	72,87	74,17	101,79
		Persentase penambahan bangunan	72,73	110,61	152,08



		pemerintah dan fasilitas umum			
		Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	58,75	59,01	100,44
		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	64,14	67,38	105,06
		Persentase pembinaan jasa konstruksi	20	24,28	121,40
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	89,54	89,54	100
3	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	76,47	70,59	92,31
4	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Persentase Luas Genangan Banjir	0,116	0,116	100
5	Meningkatnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP	74,93/BB	79,82/BB	106,43
		Persentase pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan Lab Uji bahan konstruksi sesuai standar SNI	100	100	100
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>107,28</b>

Sumber: Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022

### C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

#### 1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.





- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.21 sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN (%)	KET
1	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	100,60	69.668.679.748,00	68.331.365.518,00	98,40	Efisien
2	Meningkatnya sarana & prasarana perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah	101,79	2.153.300.000,00	2.128.500.000,00	98,85	Efisien
		Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	152,08	38.601.607.625,00	37.858.096.824,00	98,07	Efisien
		Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	100,44	43.1974.326.543,00	43.786.844.544,00	99,57	Efisien
		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	105,06	62.061.088.990,00	54.161.146.591,00	87,27	Efisien
		Persentase pembinaan jasa konstruksi	121,40	4.988.440,00	2.000.000,00	40,09	Tidak Efisien
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	100	801.129.420,00	765.298.594,00	95,53	Efisien
		3	Meningkatnya penyediaan sarana dan	Persentase TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS	92,31	1.288.602.720,00	1.249.219.775,00



	prasarana persampahan	yang terbangun					
4	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Persentase Luas Genangan Banjir	100	25.084.518.239,00	24.328.270.855,00	96,99	Efisien
5	Meningkatnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP	101,53	12.254.175.972,00	10.458.000.236,00	85,36	Efisien
		Persentase pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan Lab Uji bahan konstruksi sesuai standar SNI	100				
<b>Total Capaian</b>			<b>107,28</b>			<b>99,49</b>	<b>Efisien</b>

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pengesahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2022, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022**

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Output/Outcome	Keuangan 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Meningkatnya Pelayanan Air Bersih</b>				
a	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>Volume tampungan air baku (meter<sup>3</sup>)</b>	<b>45.779.396.848,00</b>	<b>44.582.787.509,00</b>	<b>97,39</b>
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun (buah) Volume tampungan embung dan penampung lainnya	45.779.396.848,00	44.582.787.509,00	97,39
	- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan (buah)	399.998.155,00	394.072.890,00	98,32



	- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Volume tampungan embung dan penampung lainnya	1.000.000.000,00	0	0
	- Pembangunan Unit Air Baku	Volume tampungan air baku	12.319.464.347,00	12.279.464.323,00	99,68
	- Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah penambahan panjang kanal banjir yang terbangun	31.009.934.351,00	30.937.650.706,00	99,77
	- Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang terpelihara	1.049.999.995,00	971.599.590,00	92,53
<b>b</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan air bersih</b>	<b>23.889.282.900,00</b>	<b>23.748.578.009,00</b>	<b>99,41</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi air minum	23.889.282.900,00	23.748.578.009,00	99,41
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	100.000.000,00	0	0
	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah pengadaan Sambungan Rumah (SR)	23.789.282.900,00	23.748.578.009	99,83
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan</b>				
<b>a</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik</b>	<b>2.153.300.000,00</b>	<b>2.128.500.000,00</b>	<b>98,85</b>
	- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		20.000.000,00	0	0
	- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	2.133.300.000,00	2.128.500.000,00	99,77
<b>b</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum</b>	<b>18.137.034.368,00</b>	<b>17.409.144.869,00</b>	<b>95,99</b>
	- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung dan fasilitas umum yang terbangun	16.759.272.018,00	16.057.240.869,00	95,81
	- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung dan fasilitas umum yang terpelihara	1.377.762.350,00	1.351.904.000,00	98,12
<b>c</b>	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata</b>	<b>27.245.483.903,00</b>	<b>27.242.153.064,00</b>	<b>99,99</b>
	- Penataan Bangunan Lingkungan	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	27.245.483.903,00	27.242.153.064,00	99,99
<b>d</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap</b>	<b>60.509.967.378,00</b>	<b>59.527.018.619,00</b>	<b>98,38</b>
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan	1.121.287.001,00	1.117.441.000,00	98,38
	- Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey	337.292.200,00	324.545.729,00	96,22
	- Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya	45.187.995.856,00	44.418.472.490,00	98,30
	- Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	6.333.027.000,00	6.295.540.000,00	99,41
	- Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang terpelihara	4.552.526.000,00	4.413.983.900,00	96,96
	- Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	1.209.993.821,00	1.189.190.000,00	98,28
	- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan (utang)	1.767.845.500,00	1.767.845.500,00	100,00
<b>e</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>30.062.267,00</b>	<b>6.480.000,00</b>	<b>21,56</b>
	- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana	30.062.267,00	6.480.000,00	21,56



f	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	234.473.505,00	184.058.540,00	77,04
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang ditetapkan	134.477.600,00	116.922.690,00	86,95
	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW yang mendapat persetujuan substansi	134.477.600,00	116.922.690,00	86,95
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor yang dilaksanakan	99.995.905,00	67.135.850,00	67,14
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi TKPRD	99.995.905,00	67.135.850,00	67,14
3	<b>Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan</b>				
	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun</b>	<b>1.350.585.000,00</b>	<b>1.337.507.000,00</b>	<b>99,03</b>
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	1.350.585.000,00	1.337.507.000,00	99,03
	- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah penambahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	1.350.585.000,00	1.337.507.000,00	99,03
4	<b>Meningkatnya Pengendalian Banjir</b>				
	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>Persentase luas genangan banjir (%)</b>	<b>16.879.523.528,00</b>	<b>16.672.823.400,00</b>	<b>98,78</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas genangan yang tertangani (Ha)	16.879.523.528,00	16.672.823.400,00	98,78
	- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang terpelihara	1.499.990.180,00	1.422.918.750,00	94,86
	- Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	14.989.600.000,00	14.869.611.650,00	99,20
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan	389.933.348,00	380.293.000,00	97,53
5	<b>Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi</b>	<b>10.242.226.168,00</b>	<b>9.712.696.068,00</b>	<b>94,83</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	9.222.959.264,00	8.989.559.633,00	97,47
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	8.212.233.083,00	8.155.985.201,00	99,32
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	1.010.726.181,00	833.574.432,00	82,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	115.970.650,00	87.580.096,00	75,52
	- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5.000.000,00	4.262.500,00	85,25
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	59.995.504,00	52.075.100,00	86,80
		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia jumlah tenaga kebersihan			
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	29.986.346,00	18.451.870,00	61,53
		Jumlah barang penggandaan			



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	20.988.800,00	12.790.626,00	60,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat lab yang terkalibrasi dan terakreditasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	341.684.165,00	142.700.489,00	41,76
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1.000.000,00	1.000.000,00	100
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	340.684.165,00	141.700.489,00	41,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara	521.612.089,00	452.855.850,00	86,82
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terselenggara	5.700.000,00	5.403.100,00	94,79
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terselenggara	457.595.768,00	390.300.650,00	85,29
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terselenggara			
	Jumlah BBM yang diadakan			
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan lab yang terpelihara	33.835.265,00	33.042.900,00	97,66
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara (unit)	24.481.056,00	24.109.200,00	98,48
<b>Total Anggaran Prioritas</b>		<b>255.892.417.697,00</b>	<b>243.066.742.937,00</b>	<b>94,99</b>

Sumber: Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaannya bahwasanya besaran untuk anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 255.892.417.697,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 243.066.742.937,00 sehingga serapan capaian menunjukkan angka 94,99%.

## 2. Perbandingan Anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan memiliki sumber dana yang berasal dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2022 yang disajikan dalam tabel 3.23 sebagai berikut.



**Tabel 3.23**  
**Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan**  
**Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan**

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2019	251.539.164.823,01	93.936.870.089,67	157.602.294.733,34	62,65
2	2020	225.746.739.018,00	218.621.980.028,00	7.124.758.990,00	96,84
3	2021	194.664.294.125,00	191.655.534.893,00	3.008.759.232,00	98,45
4	2022	255.892.417.697,00	243.066.742.937,00	12.820.686.320,00	94,99

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPUPR, 2022



## **BAB IV PENUTUP**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tarakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan di bidang Bina Marga, Pengairan Sumber Daya Air, dan Cipta Karya dan Penataan Ruang yang merupakan cerminan dari hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun anggaran 2022.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan pada tahun 2022 melaksanakan 11 (sebelas) program yang diimplementasikan ke dalam 17 (tujuh belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan sumber pembiayaan APBD sebesar Rp 255.892.417.697,00.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja hingga evaluasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan dan capaian program yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, secara umum dapat dikatakan sangat baik, dimana terdapat 5 (empat) sasaran dari 10 (sepuluh) indikator dengan kinerja sama dengan atau diatas 100%.

### **A. Kesimpulan**

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran dan 11 (sebelas) Indikator, adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja  $90 \geq 100$  % kategori “sangat tinggi” sebanyak 5 (lima) sasaran atau 11 (sebelas) Indikator, 100,60%, 101,79%, 152,08%, 100,44%, 105,6%, 121,40%,



100%, 92,31%, 100% dan 106,53 % yang telah melampaui batas maksimal keberhasilan.

## **B. Tindak Lanjut Rekomendasi**

### **1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan telah di evaluasi oleh Tim Inspektorat Kota Tarakan dengan hasil evaluasi memperoleh nilai sebesar 79,82 % dengan kategori BB atau dengan interpretasi Sangat Baik, namun ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari Inspektorat Kota Tarakan diantaranya:

- 1) Segera menetapkan ukuran keberhasilan (indikator) terhadap Tujuan Organisasi pada Dokumen Renstra;
- 2) Segera menetapkan Tujuan Perangkat Daerah disertai dengan Target Keberhasilan yang sesuai dengan Indikator Tujuannya;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan agar meningkatkan keandalan dalam penyampaian informasi mengenai Kinerjanya pada Dokumen LKIP.

Tindak lanjut atas Rekomendasi yang dilakukan pada tahun 2022:

1. Ukuran Keberhasilan (indikator) terhadap tujuan organisasi pada dokumen perencanaan sudah ditetapkan.
2. Tujuan Perangkat Daerah disertai target keberhasilan yang sesuai dengan indikator tujuannya sudah ditetapkan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah meningkatkan keandalan dalam penyampaian informasi mengenai kinerjanya pada dokumen LKIP dengan berkoordinasi pada Bagian Organisasi dan Bappeda Litbang.





## 2. Intern Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang, dalam penyelenggaraan urusan serta kebijakan di bidang Bina Marga, Pengairan Sumber Daya Air, dan Cipta Karya dan Penataan Ruang, maka tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan kedepannya adalah:

1. Melakukan Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024;
2. Penambahan sarana prasarana pendukung untuk memaksimalkan ruang gerak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kinerja kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022;
3. Menyiapkan regulasi teknis di bidang bina marga, pengairan sumber daya air dan cipta karya dan penataan ruang untuk lebih menjamin kualitas pelayanan infrastruktur serta memberikan kepastian hukum dan referensi bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha di Kota Tarakan;
4. Meningkatkan pembinaan pengawasan/pemantauan pelaksanaan infrastruktur terhadap perusahaan di Kota Tarakan sehingga kesadaran atas kewajiban untuk menyelesaikan pelaksanaan infrastruktur terus meningkat;
5. Meningkatkan koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dengan OPD/Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, evaluasi perbaikan dan penyempurnaan SP-SOP khususnya dalam hal penyedehanaan dan



percepatan prosedur perizinan serta transparansi dan kemudahan akses terhadap informasi perizinan sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan transparan;

7. Meningkatkan kompetensi dan interpersonal skill aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui diklat dan bimbingan teknis khususnya di bidang pelayanan perizinan Uji Laboratorium Bahan Konstruksi pada UPT. Laboratorium Uji Bahan Konstruksi untuk menjaga serta meningkatkan konsistensi dan produktivitas kinerja instansi;
8. Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

# LAMPIRAN

**LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN  
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DESEMBER**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)		(Rp.)	
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>JUMLAH ANG./REALISASI FISIK &amp; KEU. KUMULATIF SKPD</b>	<b>255,892,417,697.00</b>	<b>100.00</b>	<b>93.43</b>	<b>94.99</b>	<b>243,066,742,937.00</b>	<b>12,820,686,320.00</b>	<b>Fandariansyah, S.T., M.T.</b>
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,254,175,972.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.90</b>	<b>85.34</b>	<b>10,458,000,236.00</b>	<b>1,796,175,736.00</b>	
1.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11,155,162,490.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>84.69</b>	<b>9,446,867,293.00</b>	<b>1,708,295,197.00</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,254,383,216.00	100.00	100.00	84.65	8,679,971,742.00	1,574,411,474.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900,779,274.00	100.00	100.00	85.14	766,895,551.00	133,883,723.00	Sudaryati, S.E.
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>122,587,730.00</b>	<b>100.00</b>	<b>90.37</b>	<b>79.54</b>	<b>97,507,395.00</b>	<b>25,080,335.00</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,998,380.00	100.00	100.00	89.52	4,474,350.00	524,030.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,801,780.00	0.00	100.00	97.66	25,197,000.00	604,780.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,988,400.00	100.00	100.00	87.15	34,848,295.00	5,140,105.00	Fadliansyah, S.IP.

1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,999,770.00	100.00	67.84	51.78	16,570,350.00	15,429,420.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,799,400.00	100.00	92.38	82.92	16,417,400.00	3,382,000.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.94</b>	<b>49,972,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	100.00	100.00	99.94	49,972,000.00	28,000.00	Alie Zulkarnain, S.T.
1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>178,336,970.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>83.35</b>	<b>148,643,118.00</b>	<b>29,693,852.00</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	100.00	100.00	100.00	2,000,000.00	0.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176,336,970.00	100.00	100.00	83.16	146,643,118.00	29,693,852.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>748,088,782.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.88</b>	<b>95.58</b>	<b>715,010,430.00</b>	<b>33,078,352.00</b>	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5,700,000.00	100.00	100.00	96.87	5,521,800.00	178,200.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	457,576,711.00	100.00	99.93	94.43	432,096,468.00	25,480,243.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	145,065,000.00	100.00	100.00	99.89	144,908,058.00	156,942.00	Fadliansyah, S.IP.
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,992,950.00	100.00	100.00	97.98	97,973,260.00	2,019,690.00	Alie Zulkarnain, S.T.
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39,754,121.00	100.00	98.44	86.81	34,510,844.00	5,243,277.00	Fadliansyah, S.IP.

1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>45,779,396,848.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.93</b>	<b>97.39</b>	<b>44,582,787,509.00</b>	<b>1,196,609,339.00</b>	
1.03.02.2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45,779,396,848.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.93</b>	<b>97.39</b>	<b>44,582,787,509.00</b>	<b>1,196,609,339.00</b>	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	399,998,155.00	100.00	100.00	98.52	394,072,890.00	5,925,265.00	Ir. Muji Slamet Hidayat, S.T.
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	Ir. Muji Slamet Hidayat, S.T.
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	12,319,464,347.00	100.00	100.00	99.68	12,279,464,323.00	40,000,024.00	Ir. Muji Slamet Hidayat, S.T.
1.03.02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	31,009,934,351.00	100.00	97.22	99.77	30,937,650,706.00	72,283,645.00	Ir. Muji Slamet Hidayat, S.T. Johan, S.T.
1.03.02.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	1,049,999,995.00	100.00	100.00	92.53	971,599,590.00	78,400,405.00	Ir. Muji Slamet Hidayat, S.T. Johan, S.T.
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>23,889,282,900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.56</b>	<b>99.41</b>	<b>23,748,578,009.00</b>	<b>140,704,891.00</b>	
1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23,889,282,900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.56</b>	<b>99.41</b>	<b>23,748,578,009.00</b>	<b>140,704,891.00</b>	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	Dilla Wahyuni, S.T.
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	23,789,282,900.00	100.00	99.98	99.83	23,748,578,009.00	40,704,891.00	Dilla Wahyuni, S.T.
1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>1,288,602,720.00</b>	<b>100.00</b>	<b>73.28</b>	<b>96.94</b>	<b>1,249,219,775.00</b>	<b>39,382,945.00</b>	
1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,288,602,720.00</b>	<b>100.00</b>	<b>73.28</b>	<b>96.94</b>	<b>1,249,219,775.00</b>	<b>39,382,945.00</b>	

1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1,288,602,720.00	100.00	73.28	96.94	1,249,219,775.00	39,382,945.00	Dilla Wahyuni, S.T.
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>2,153,300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.85</b>	<b>98.85</b>	<b>2,128,500,000.00</b>	<b>24,800,000.00</b>	
1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,153,300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.85</b>	<b>98.85</b>	<b>2,128,500,000.00</b>	<b>24,800,000.00</b>	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	20,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	Dilla Wahyuni, S.T.
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2,133,300,000.00	100.00	99.77	99.77	2,128,500,000.00	4,800,000.00	Dilla Wahyuni, S.T.
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>25,084,518,239.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.62</b>	<b>96.99</b>	<b>24,328,270,855.00</b>	<b>756,247,384.00</b>	
1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,084,518,239.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.62</b>	<b>96.99</b>	<b>24,328,270,855.00</b>	<b>756,247,384.00</b>	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3,200,000,000.00	100.00	84.36	82.96	2,654,687,655.00	545,312,345.00	Johan, S.T.
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1,224,518,239.00	100.00	99.97	97.03	1,188,171,700.00	36,346,539.00	Johan, S.T.
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	20,660,000,000.00	100.00	99.54	99.15	20,485,411,500.00	174,588,500.00	Ir. Muji Slamet Hidayat, S.T. Johan, S.T.
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>38,601,607,625.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85.47</b>	<b>98.07</b>	<b>37,858,096,824.00</b>	<b>743,510,801.00</b>	
1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>38,601,607,625.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85.47</b>	<b>98.07</b>	<b>37,858,096,824.00</b>	<b>743,510,801.00</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran	122,020,680.00	100.00	51.48	47.83	58,358,912.00	63,661,768.00	Abdul Rahim, S.T.

	Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG							
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	34,460,046,534.00	100.00	83.89	98.07	33,795,611,096.00	664,435,438.00	Abdul Rahim, S.T.
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4,019,540,411.00	100.00	100.00	99.62	4,004,126,816.00	15,413,595.00	Abdul Rahim, S.T.
1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>43,974,326,543.00</b>	<b>100.00</b>	<b>87.07</b>	<b>99.57</b>	<b>43,786,844,544.00</b>	<b>187,481,999.00</b>	
1.03.09.2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>43,974,326,543.00</b>	<b>100.00</b>	<b>87.07</b>	<b>99.57</b>	<b>43,786,844,544.00</b>	<b>187,481,999.00</b>	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	43,974,326,543.00	100.00	87.07	99.57	43,786,844,544.00	187,481,999.00	Abdul Rahim, S.T.
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>62,061,088,990.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.88</b>	<b>87.27</b>	<b>54,161,146,591.00</b>	<b>7,899,942,399.00</b>	
1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>62,061,088,990.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.88</b>	<b>87.27</b>	<b>54,161,146,591.00</b>	<b>7,899,942,399.00</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200,000,000.00	100.00	99.66	98.69	197,386,000.00	2,614,000.00	Syahrun, S.T.
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	366,267,200.00	0.00	100.00	97.73	357,943,503.00	8,323,697.00	Jamaluddin, S.T., M.H.
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1,445,761,832.00	100.00	59.33	99.98	1,445,432,275.00	329,557.00	Jamaluddin, S.T., M.H.
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	47,973,733,433.00	100.00	96.50	83.59	40,101,229,088.00	7,872,504,345.00	Syahrun, S.T. Jamaluddin, S.T., M.H.
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	5,846,681,300.00	100.00	100.00	99.80	5,835,279,600.00	11,401,700.00	Syahrun, S.T.
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2,060,799,000.00	100.00	100.00	99.92	2,059,130,000.00	1,669,000.00	Syahrun, S.T.



1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	3,667,846,225.00	100.00	92.08	99.98	3,667,114,125.00	732,100.00	Jamaluddin, S.T., M.H. Johan, S.T.
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	500,000,000.00	100.00	100.00	99.53	497,632,000.00	2,368,000.00	Syahrin, S.T.
1:03:11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>4,988,440.00</b>	<b>100.00</b>	<b>40.09</b>	<b>40.09</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,988,440.00</b>	
01.03.11.2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>4,988,440.00</b>	<b>100.00</b>	<b>40.09</b>	<b>40.09</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,988,440.00</b>	
01.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4,988,440.00	100.00	40.09	40.09	2,000,000.00	2,988,440.00	Syahrin, S.T.
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>801,129,420.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.84</b>	<b>95.53</b>	<b>765,298,594.00</b>	<b>35,830,826.00</b>	
1.03.12.2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>680,065,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.49</b>	<b>95.38</b>	<b>648,656,064.00</b>	<b>31,409,486.00</b>	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	630,156,200.00	100.00	97.29	95.84	603,966,386.00	26,189,814.00	Ike Deasy Natalia, S.T.
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	49,909,350.00	100.00	100.00	89.54	44,689,678.00	5,219,672.00	Ike Deasy Natalia, S.T.
1.03.12.2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>71,063,870.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.68</b>	<b>94.16</b>	<b>66,914,530.00</b>	<b>4,149,340.00</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	30,930,000.00	100.00	99.25	94.87	29,344,360.00	1,585,640.00	Ike Deasy Natalia, S.T.
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	40,133,870.00	100.00	100.00	93.61	37,570,170.00	2,563,700.00	Ike Deasy Natalia, S.T.
1.03.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.46</b>	<b>49,728,000.00</b>	<b>272,000.00</b>	

1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	50,000,000.00	100.00	100.00	99.46	49,728,000.00	272,000.00	Ike Deasy Natalia, S.T.
-----------------	--	---------------	--------	--------	-------	---------------	------------	----------------------------